



GOOD GOVERNANCE

PENGERTIAN GOOD GOVERNANCE

-  Tindakan/tingkah laku yg didasarkan pada nilai-nilai yg bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai tsb dalam tindakan dan kehidupan keseharian.
 -  Suatu kesepakatan yg menyangkut pengaturan negara yg diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta, yg mencakup keseluruhan bentuk mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingannya, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban, dan menjembatani perbedaan diantara mereka.
 -  INDIKATOR PEMERINTAHAN YANG BAIK : produktif dan memperlihatkan ekonomi rakyat meningkat, baik dalam aspek produktivitas maupun daya belinya, kesejahteraan spiritualnya terus meningkat (terlihat dari rasa aman, tenang dan bahagia), serta *sense of nationality* yang baik.
-

PRINSIP- PRINSIP GOOD GOVERNANCE - 1



Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyimpulkan ada 9 aspek fundamental dalam mewujudkan Good Governance (GG): Partisipasi, Penegakan Hukum, Transparansi, Responsif, Konsensus, Kesenjangan dan Keadilan, Efektivitas dan Efisiensi, Akuntabilitas dan Visi Strategis



Partisipasi : semua WN berhak terlibat dalam pengambilan keputusan, langsung maupun melalui DPR; dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul & mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif



Penegakan Hukum : proses mewujudkan cita GG harus diimbangi dg komitmen untuk penegakan hukum (gakkum), dg karakter : (a) supremasi hukum, (b) kepastian hukum, (c) hukum yg responsif, (d) gakkum yang konsisten & non-diskriminatif, dan (e) independensi peradilan.



Transparansi: keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk memberantas KKN diperlukan keterbukaan dalam transaksi dan pengelolaan keuangan negara,serta pengelolaan sektor-sektor publik.





Responsif: peka dan cepat tanggap terhadap persoalan masyarakat. Pemerintah harus memiliki etik individual, dan etik sosial. Dalam merumuskan kebijakan pembangunan sosial, pem hrs memperhatikan karakteristik kultural, dan perlakuan yang humanis pd masyarakat.


PRINSIP- PRINSIP GOOD GOVERNANCE - 2

 Konsensus : pengambilan keputusan melalui musyawarah dan semaksimal mungkin berdasarkan kesepakatan bersama.

 Kesetaraan dan Keadilan: kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Pemerintah hrs memberikan kesempatan pelayanan dan perlakuan yg sama dalam koridor kejujuran dan keadilan.

 Efektivitas dan Efisiensi: berdayaguna dan berhasilguna. Kriteria efektivitas diukur dg parameter produk yg dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok & lapisan sosial. Efisiensi diukur dg rasionalitas biaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat. Pem hrs mampu menyusun perencanaan yg sesuai dg kebutuhan nyata masy, rasional & terukur.

 Akuntabilitas: pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yg memberikan kewenangan mengurus kepentingannya. Ada Akuntabilitis vertikal (pemegang kekuasaan dg rakyat; pem dg WN; pejabat dg pejabat di atasnya), dan akuntabilitas horizontal (pemegang jabatan publik dg lembaga setara; profesi setara).

 Visi Strategis: pandangan strategis untuk menghadapi masa y.a.d. Hal ini penting, karena setiap bangsa perlu memiliki sensitivitas thd perubahan serta prediksi perubahan ke depan akibat kemajuan tekno, agar dapat merumuskan berbagai kebijakan untuk mengatasi dan mengantisipasi permasalahan.

PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE

 Langkah-langkah pewujudan Good Governance:

1. Penguatan fungsi dan peran Lembaga Perwakilan
2. Kemandirian Lembaga Perwakilan
3. Aparatur Pemerintahan yg profesional dan penuh integritas
4. Masyarakat madani yang kuat dan partisipatif
5. Penguatan upaya Otonomi Daerah

 Good Governance dalam kerangka Otoda:

- * Desentralisasi merupakan prasyarat bagi terciptanya GG.
 - * Desentralisasi : pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah dalam proses pengambilan keputusan.
 - * Desentralisasi hrs ditindaklanjuti dg perubahan manajemen pemda → hrs terjadi perubahan nilai yg semula menganut proses manajemen yg berorientasi kpd kepentingan internal organisasi pemerintah ke kepentingan eksternal disertai dg peningkatan pelayanan dan pendelegasian sebag tugas pelayanan pemerintah ke masyarakat.
-